

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian mandiri Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan reformasi birokrasi, Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen Perubahan dengan bobot 5,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 4,16 atau 83,13 %.
2. Aspek Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan bobot 5,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 2,5 atau 50 %.
3. Aspek Penataan dan Penguatan Organisasi dengan bobot 6,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 6,00 atau 100 %.
4. Aspek Penataan Tata Laksana dengan bobot 5,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 3,58 atau 71,52 %.
5. Aspek Penataan Sistem SDM dengan bobot 15,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 11,96 atau 79,74 %.
6. Aspek Penguatan Akuntabilitas dengan bobot 6,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 5,74 atau 95,60 %.
7. Aspek Penguatan Pengawasan dengan bobot 12,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 8,93 atau 74,42 %.
8. Aspek Peningkatan Kualias Pelayanan Publik dengan bobot 6,00 Dinas DKP Kota Padang memperoleh nilai 3,96 atau 66,08 %.

#### **4.2. SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya konkrit untuk meningkatkan nilai pada Aspek Penataan Peraturan Perundang-undangan mengingat nilainya masih rendah yaitu 50 %.
2. Perlu dilakukan upaya konkrit untuk meningkatkan nilai Aspek Peningkatan Kualias Pelayanan Publik mengingat nilainya masih rendah yaitu 66,08 %.
3. Perlu dilakukan pembenahan Aspek Manajemen Perubahan mengingat nilainya masih sudah cukup tinggi yaitu 85,33 %.
4. Perlu dipertahankan Aspek Penataan dan Penguatan Organisasi nilainya sudah 100 %.
5. Perlu dilakukan pembenahan Aspek Penataan Tata Laksana mengingat nilainya masih sudah cukup tinggi yaitu 71,52 %.
6. Perlu dilakukan pembenahan Aspek Penataan Sistem SDM mengingat nilainya masih sudah cukup tinggi yaitu 79,74 %.
7. Perlu dipertahankan Aspek Penguatan Akuntabilitas nilainya 95,60 %.
8. Perlu dilakukan pembenahan Aspek Penguatan Pengawasan mengingat nilainya masih sudah cukup tinggi yaitu 74,42 %.